



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293,
Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el setda@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 100.3.3.5/16/SETDA/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati.

KETIGA : Inspektorat Daerah wajib :

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29JUNI 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN, SKM., M.Kes
NIP. 19700405 198912 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 100.3.3.5/16/SETDA/2026
TANGGAL 29 JUNI 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029
I. Indikator Kinerja Utama (IKU)
A. Pejabat Eselon IIa

No.	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai EPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	1,865	2,625	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100	Sekretariat Daerah
2	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	11,40	11,49	11,80	12,00	12,20	12,40	12,60	Sekretariat Daerah
3	Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target	$\frac{\text{Jumlah Persentase CapaianKinerja OPD yg mencapai target}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	97,45%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Sekretariat Daerah
4	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat	77,12 (BB)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	85 (A)	Sekretariat Daerah
5	Nilai Kematangan Inovasi Setda	Nilai kematangan Inovasi Sekretariat Daerah Oleh Bapperida	90	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

B. Pejabat Esselon III

No.	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah	"Jumlah Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah X 100%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	HUKUM
		Jumlah Target Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah"								
2	Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum	Jumlah Nagari yang berhasil mencapai status binaan sadar hukum X 100% Jumlah Nagari yang ditargetkan untuk dibina ditahun berjalan	5%	9,89%	10,44%	10,99%	11,54%	12,09 %	13,19%	HUKUM
3	Persentase Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan X 100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	HUKUM
		Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diusulkan								
4	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat X 100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	KESRA
		Target Pelaksanaan Kebijakan Kesra								
5	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan Wajib yang harus dilaksanakan (LPPD, LKPj dan Laporan SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TAPEM

6	Efektifitas Kerjasama Daerah	Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain atau dengan Pihak Ketiga yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TAPEM
7	Persentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan	Jumlah Kerja Sama yang ditandatangani $\frac{\quad}{\text{Jumlah Target Kerja Sama}} \times 100\%$	45	50	52	54	56	58	60	TAPEM
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Penilaian LKPP RI	79,04	79,51	65	66	67	68	71	PBJ
9	Tingkat Kematangan UKPBJ	Hasil Penilaian Kapabilitas UKPBJ dalam Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa oleh LKPP RI	(9 / 9) proaktif	(9/9) proaktif	(9/9) proaktif	(9/9) proaktif	(9/9) proaktif	(9/9) proaktif	(9/9) proaktif	PBJ
10	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan $\frac{\quad}{\text{Jumlah Total Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan}} \times 100\%$	70%	75%	80%	82%	85%	87%	90%	PEREKONOMIAN
11	Total Kredit/PDRB (%)	Total Kredit Per Kabupaten $\frac{\quad}{\text{PDRB}} \times 100\%$		19,81%	21,00%	22%	23%	24%	25,15%	PEREKONOMIAN
12	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	Total Dana Pihak Ketiga $\frac{\quad}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$		6,44	9,44	12,44	15,44	18,44	20,46	PEREKONOMIAN
13	Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Kabupaten (Rupiah)	Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten selama setahun $\frac{\quad}{\text{Jumlah Penduduk Per Kabupaten}}$		567.119	636.327	736.327	836.327	936.327	1.136.327	PEREKONOMIAN
14	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	Laba Bersih		0,43	0,45	0,47	0,49	0,50	0,52	PEREKONOMIAN

		$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$								
15	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	$IKAD_m = \left(\sum_{t=1}^{14} a_{12tm} \right) \times 10$		3,86	3,95	4,10	4,25	4,40	4,50	PEREKONOMIAN
16	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Kebijakan Administrasi Pembangunan $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	65%	75%	80%	82%	85%	87%	90%	PEMBANGUNAN
17	Nilai RB General	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	69,38	69,32	69,72	70,12	70, 52	70, 92	71,32	ORGANISASI
18	Nilai Rata-rata SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	Total Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja $\frac{\text{Total Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	12,14	12,34	12,54	12,74	12,94	13,14	13,34	ORGANISASI
19	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	KOD = TNPd/ JPD KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPd = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah	NA	37,1 (Tinggi)	37,1 (Tinggi)	37,5 (Tinggi)	37,5 (Tinggi)	37,5 (Tinggi)	38 (Tinggi)	ORGANISASI
20	Persentase Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memiliki IKM Baik	Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah $\frac{\text{Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$		87,64	88,04	88,24	88,44	88,64	88,84	ORGANISASI
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	91,49	91,52	91,55	91,58	91,61	91,64	91,67	ORGANISASI
22	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap	Jumlah kepuasan		85%	86%	87%	88%	89%	90%	PROKOPIM

	Layanan Keprotokolan	Stakeholder terhadap layanan keprotokolan _____ X 100% Jumlah keseluruhan layanan keprotokolan								
23	Persentase Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang didokumentasikan _____ X 100% Jumlah seluruh Kegiatan Pimpinan		85%	86%	87%	88%	89%	90%	PROKOPIM
24	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP terpenuhi _____ X 100% Jumlah Kebutuhan Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UMUM
25	Persentase Layanan Surat menyurat sesuai SOP	Jumlah Layanan Surat menyurat sesuai SOP terpenuhi _____ X 100% Total Kebutuhan Layanan Surat menyurat sesuai SOP	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UMUM
26	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP terpenuhi _____ X 100% Total Kebutuhan Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	UMUM
27	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang lengkap _____ X 100% Jumlah Total Dokumen Perencanaan, Pengendalian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KEUANGAN

		dan Evaluasi								
28	Ketepatan waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen yang disampaikan tepat waktu X 100% Jumlah Dokumen yang wajib disampaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KEUANGAN

I. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Agar seluruh stakeholder Sekretariat Daerah memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU adalah sebagai berikut :

1. Nilai EPPD

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama
Definisi Operasional	:	Nilai EPPD adalah skor hasil evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Nilai ini mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, tata kelola, pelayanan publik, dan pencapaian target pembangunan selama satu tahun anggaran.
Formulasi	:	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri
Sumber data	:	Peringkat dalam Laporan EKPPD dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Sekretariat Daerah

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama
Definisi Operasional	:	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja adalah skor yang diperoleh pemerintah daerah pada aspek Pelaporan Kinerja dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini menggambarkan kualitas penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah, yang mencakup penyajian capaian kinerja, analisis pencapaian sasaran, pemanfaatan informasi kinerja, serta kesesuaian laporan dengan indikator dan target yang telah ditetapkan.
Formulasi	:	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sumber data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Permenpan RB
Penanggung jawab	:	Sekretariat Daerah

3. Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama
Definisi Operasional	:	Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang Mencapai Target adalah ukuran yang menunjukkan proporsi kepala perangkat daerah yang berhasil memenuhi atau melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja atau dokumen perencanaan kinerja pada periode tertentu. Variabel ini menggambarkan tingkat keberhasilan kepala perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.
Formulasi	:	Jumlah Persentase Capaian Kinerja OPD yg mencapai target $\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun
Penanggung jawab	:	Sekretariat Daerah

4. Nilai AKIP Sekretariat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP Sekretariat Daerah adalah skor hasil evaluasi terhadap penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah. Nilai ini mencerminkan tingkat akuntabilitas dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan evaluasi AKIP.
Formulasi	:	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Setda oleh Inspektorat
Sumber data	:	Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Sekretariat Daerah

5. Nilai Kematangan Inovasi Setda

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah adalah skor yang menunjukkan tingkat kematangan pengelolaan inovasi pada Sekretariat Daerah berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek tata kelola, kapasitas organisasi, proses inovasi, implementasi, dan keberlanjutan inovasi. Nilai ini mencerminkan kemampuan Sekretariat Daerah dalam mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, dan mempertahankan inovasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Formulasi	:	Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah oleh Bapperida
Sumber data	:	Bapperida Pesisir Selatan
Penanggung jawab	:	Sekretariat Daerah

6. Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi di bidang hukum yang menjadi tugas pemerintah daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja pada periode tertentu. Variabel ini mencerminkan tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pembinaan, harmonisasi, konsultasi, pendampingan, dan koordinasi hukum oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum.
Formulasi	:	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah $\frac{\hspace{1.5cm}}{\hspace{1.5cm}} \times 100\%$ Jumlah target Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah
Sumber data	:	Bagian Hukum
Penanggung jawab	:	Bagian Hukum

7. Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum adalah ukuran yang menunjukkan proporsi nagari yang telah memenuhi kriteria sebagai nagari binaan sadar hukum dibandingkan dengan jumlah nagari yang menjadi target pembinaan pada periode tertentu. Variabel ini mencerminkan capaian pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program Desa/Kelurahan (Nagari) Sadar Hukum.
Formulasi	:	Jumlah Nagari yang berhasil mencapai status binaan sadar hukum $\frac{\hspace{1.5cm}}{\hspace{1.5cm}} \times 100\%$ Jumlah Nagari yang ditargetkan untuk dibina ditahun berjalan
Sumber data	:	Bagian Hukum
Penanggung jawab	:	Bagian Hukum

8. Persentase Produk Hukum Daerah yang dihasilkan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Persentase Produk Hukum Daerah yang Dihasilkan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian penyusunan dan penetapan produk hukum daerah dibandingkan dengan jumlah produk hukum daerah yang ditargetkan dalam periode tertentu. Variabel ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum sesuai dengan program pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Formulasi	:	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan X 100%
		Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diusulkan
Sumber data	:	Bagian Hukum
Penanggung jawab	:	Bagian Hukum

9. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat adalah tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan sasaran, target, dan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan kinerja. Variabel ini mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat dapat terlaksana serta mencapai hasil yang diharapkan pada periode tertentu.
Formulasi	:	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat X 100%
		Target Pelaksanaan Kebijakan Kesra
Sumber data	:	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Penanggung jawab	:	Bagian Kesejahteraan Rakyat

10. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Variabel ini menggambarkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
Formulasi	:	Laporan Wajib yang harus dilaksanakan (LPPD, LKPj dan Laporan SPM)
Sumber data	:	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
Penanggung jawab	:	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama

11. Efektifitas Kerjasama Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Tingkat keberhasilan pelaksanaan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, swasta, atau pihak lainnya dalam mencapai tujuan yang telah disepakati secara optimal.
Formulasi	:	Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain atau dengan Pihak Ketiga yang ditindaklanjuti
Sumber data	:	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
Penanggung jawab	:	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama

12. Persentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Persentase Kerja Sama Wajib yang Dilaksanakan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan kerja sama yang bersifat wajib oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan jumlah kerja sama wajib yang direncanakan atau ditargetkan dalam periode tertentu. Variabel ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kerja sama antar daerah, dengan pemerintah pusat, maupun pihak lain yang bersifat wajib untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Formulasi	:	Jumlah Kerja Sama yang ditandatangani —————X 100% Jumlah Target Kerja Sama
Sumber data	:	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
Penanggung jawab	:	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama

13. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Tingkat kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa yang diukur berdasarkan penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh proses pengadaan.
Formulasi	:	Hasil Penilaian LKPP RI
Sumber data	:	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Penanggung jawab	:	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

14. Tingkat Kematangan UKPBJ

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Tingkat kemampuan UKPBJ dalam menjalankan fungsi pengadaan sesuai model kematangan yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Formulasi	:	Hasil Penilaian Kapabilitas UKPBJ dalam Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa oleh LKPP RI
Sumber data	:	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Penanggung jawab	:	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

15. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang pengelolaan perekonomian dan pembangunan yang diukur berdasarkan ketercapaian tujuan, ketepatan pelaksanaan, koordinasi, pemanfaatan sumber daya, hasil, dampak, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Formulasi	:	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan —————X 100% Jumlah Total Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
Sumber data	:	Bagian Perekonomian dan SDA
Penanggung jawab	:	Bagian Perekonomian dan SDA

16. Total Kredit/PDRB (%)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Rasio antara total kredit yang disalurkan oleh sektor perbankan dengan nilai PDRB suatu daerah pada periode tertentu yang menggambarkan tingkat pendalaman sektor keuangan dan peran intermediasi perbankan dalam perekonomian daerah.
Formulasi	:	$\frac{\text{Total Kredit Per Kabupaten}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bagian Perekonomian dan SDA
Penanggung jawab	:	Bagian Perekonomian dan SDA

17. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Rasio antara total Dana Pihak Ketiga (giro, tabungan, dan deposito) yang dihimpun oleh perbankan dengan nilai PDRB suatu daerah pada periode tertentu sebagai ukuran tingkat penghimpunan dana masyarakat dan pendalaman sektor keuangan daerah.
Formulasi	:	$\frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bagian Perekonomian dan SDA
Penanggung jawab	:	Bagian Perekonomian dan SDA

18. Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi (Rupiah)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Besarnya nilai transaksi perdagangan saham yang dilakukan oleh investor di suatu provinsi selama periode tertentu yang dibagi dengan jumlah penduduk provinsi tersebut, sebagai indikator aktivitas pasar modal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam investasi.
Formulasi	:	$\frac{\text{Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten selama setahun}}{\text{Jumlah Penduduk Per Kabupaten}}$
Sumber data	:	Bagian Perekonomian dan SDA
Penanggung jawab	:	Bagian Perekonomian dan SDA

19. Return on Aset (ROA) BUMD (%).

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Rasio yang mengukur kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh

		aset yang dimiliki selama satu periode. Nilai ROA diperoleh dari perbandingan laba bersih setelah pajak terhadap total aset dan digunakan sebagai indikator efektivitas pemanfaatan aset perusahaan.
Formulasi	:	Laba Bersih X 100% Total Aset
Sumber data	:	Bagian Perekonomian dan SDA
Penanggung jawab	:	Bagian Perekonomian dan SDA

20. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Indeks komposit yang mengukur tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di suatu daerah berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kepemilikan rekening, penggunaan produk dan jasa keuangan, serta pemerataan akses layanan.
Formulasi	:	$IKAD_m = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l z_{lm} \right) \times 10$
Sumber data	:	Bagian Perekonomian dan SDA
Penanggung jawab	:	Bagian Perekonomian dan SDA

21. Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan administrasi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
Formulasi	:	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Kebijakan Administrasi Pembangunan X 100% Jumlah Perangkat Daerah
Sumber data	:	Bagian Administrasi Pembangunan
Penanggung jawab	:	Bagian Administrasi Pembangunan

22. Nilai RB General

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Skor hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah yang mencerminkan tingkat keberhasilan implementasi reformasi birokrasi berdasarkan komponen pengungkit dan komponen hasil.
Formulasi	:	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian

		Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sumber data	:	Bagian Organisasi
Penanggung jawab	:	Bagian Organisasi

23. Nilai Rata-rata SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Rata-rata skor hasil evaluasi SAKIP pada aspek pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas penyusunan, keandalan data, kesesuaian indikator, keterukuran capaian, dan pemanfaatan laporan kinerja oleh perangkat daerah.
Formulasi	:	Total Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja X 100%
		Jumlah Perangkat Daerah
Sumber data	:	Bagian Organisasi
Penanggung jawab	:	Bagian Organisasi

24. Nilai Kematangan Organisasi Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Skor yang menunjukkan tingkat kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan melalui penataan kelembagaan, proses bisnis, SDM, tata kelola, sistem informasi, dan kinerja organisasi.
Formulasi	:	KOD = TNPD JPD KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah
Sumber data	:	Bagian Organisasi
Penanggung jawab	:	Bagian Organisasi

25. Persentase Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memiliki IKM Baik

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Persentase unit pelayanan publik yang memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori “Baik” atau lebih tinggi dibandingkan total unit pelayanan yang dinilai dalam periode tertentu.
Formulasi	:	Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah X 100% Jumlah Perangkat Daerah
Sumber data	:	Bagian Organisasi

Penanggung jawab	:	Bagian Organisasi
------------------	---	-------------------

26. Indeks Kepuasan Masyarakat

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan persepsi pengguna layanan terhadap berbagai unsur pelayanan seperti prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, sarana prasarana, dan penanganan pengaduan.
Formulasi	:	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Sumber data	:	Bagian Organisasi
Penanggung jawab	:	Bagian Organisasi

27. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan berdasarkan aspek ketepatan waktu, kesiapan acara, koordinasi, profesionalisme petugas, kesesuaian standar protokoler, dan kelengkapan fasilitas pendukung.
Formulasi	:	Jumlah Kepuasan Stakeholder Terhadap layanan Keprotokolan $\times 100\%$
		Jumlah seluruh layanan keprotokolan
Sumber data	:	Bagian Prokopim
Penanggung jawab	:	Bagian Prokopim

28. Persentase Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Persentase keterlaksanaan kegiatan dokumentasi (foto, video, berita, arsip) terhadap seluruh rencana kegiatan dokumentasi pimpinan dalam periode tertentu.
Formulasi	:	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang didokumentasikan $\times 100\%$
		Jumlah seluruh Kegiatan Pimpinan
Sumber data	:	Bagian Prokopim
Penanggung jawab	:	Bagian Prokopim

29. Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP dibandingkan

		dengan total layanan kepegawaian dalam periode tertentu.
Formulasi	:	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP terpenuhi X 100% Jumlah Kebutuhan Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP
Sumber data	:	Bagian Umum
Penanggung jawab	:	Bagian Umum

30. Persentase Layanan Surat menyurat sesuai SOP

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Persentase layanan surat masuk dan surat keluar yang diproses sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dibandingkan dengan total layanan surat-menyurat yang dilaksanakan dalam periode tertentu.
Formulasi	:	Jumlah Layanan Surat menyurat sesuai SOP terpenuhi X 100% Total Kebutuhan Layanan Surat menyurat sesuai SOP
Sumber data	:	Bagian Umum
Penanggung jawab	:	Bagian Umum

31. Persentase Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Persentase layanan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dibandingkan dengan total layanan sarana dan prasarana yang diberikan dalam periode tertentu.
Formulasi	:	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP terpenuhi X 100% Total Kebutuhan Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP
Sumber data	:	Bagian Umum
Penanggung jawab	:	Bagian Umum

32. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang telah disusun secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan dibandingkan dengan seluruh dokumen yang wajib disusun oleh Sekretariat Daerah dalam satu periode.

Formulasi	:	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang lengkap
		$\frac{\text{Jumlah Total Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang lengkap}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penanggung jawab	:	Bagian Perencanaan dan Keuangan

33. Ketepatan waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Esselon III
Definisi Operasional	:	Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyampaikan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, diukur berdasarkan persentase dokumen yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh dokumen yang wajib disampaikan dalam satu periode.
Formulasi	:	Jumlah Dokumen yang disampaikan tepat waktu
		$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Dokumen yang wajib disampaikan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penanggung jawab	:	Bagian Perencanaan dan Keuangan

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN, SKM., M.Kes
NIP. 19700405 198912 1 001